

## **II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA**

### **A. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Konsep Perlawanan**

Perlawanan dalam pengertian umum adalah penolakan terhadap otoritas. Kebanyakan perlawanan dilakukan untuk menggantikan pemerintah yang ada dengan pemerintahan yang baru yaitu pemerintahan idaman para pelaku perlawanan.

Menurut Nugroho Notosusanto, perlawanan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat untuk keluar dari belenggu penjajah. (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1984 : 24)

Menurut L. M. Sitorus, Perlawanan adalah gambaran jiwa yang mau merdeka menurut cara-caranya sendiri-sendiri atau proses sosial dari kaum yang tertindas. Hal tersebut merupakan reaksi nyata atas keinginan kaum-kaum tradisional yang menginginkan sebuah kebebasan. (L. M. Sitorus, 1987 : 4)

Berdasarkan pendapat dari Nugroho dan L. M. Sitorus, jika dikaitkan dengan perlawanan yang dilakukan oleh tentara Peta di Blitar maka perlawanan dapat diartikan sebagai suatu bentuk refleksi nyata dari sebuah gambaran jiwa para

anggota tentara Peta yang mencoba melepaskan diri dari berbagai tekanan yang dihadapi guna mencapai kemerdekaan. Dalam hal ini penyebab perlawanan yang dilakukan oleh tentara Peta di Blitar itu terjadi bukan karena satu sebab, melainkan oleh beberapa hal yang mendorongnya ke permukaan.

Ada rasa ketidakpuasan para tentara Peta terhadap Pemerintahan Jepang di Indonesia yang mengeksploitasi sumber-sumber alam Indonesia serta penindasan kepada rakyat yang dilakukan oleh tentara Jepang dan juga rasa nasionalisme mereka sebagai pemuda Indonesia yang ingin lepas dari belenggu penjajah untuk segera mendapatkan kemerdekaan. .

## **2. Konsep Tentara Peta**

Tentara Peta adalah sebuah singkatan dari Tentara Pembela Tanah Air sebuah nama yang dikenal sebagai tentara pribumi yang mendapatkan latihan dan pendidikan militer pada masa pendudukan militer Jepang di Jawa.

Riwayat pembentukan tentara Peta dimulai dengan usul R. Gatot Mangkupradja, seorang tokoh Pergerakan Nasional Indonesia yang pernah dituntut di depan hakim Kolonial Belanda bersama dengan Bung Karno melalui suratnya yang ditujukan kepada *Gunseikan* pada tanggal 7 September 1943. Isi surat itu berupa permohonan mengenai pembentukan Barisan Sukarela Tanah Air.

Dan dalam waktu tidak ada sebulan setelah permohonan Gatot Mangkupradja, dikeluarkan *Osamu Seirei No. 44* pada tanggal 3 Oktober 1943, mengenai "Pembentukan Pasukan Sukarela untuk Membela Jawa". Menurut Nugroho Notosusanto bahwa

Peraturan itu mengandung butir-butir sebagai berikut :

1. Tentara Peta keanggotaan Indonesia (penduduk asli) dari atas sampai bawah.
2. Di dalam tentara Peta akan ditempatkan militer Jepang untuk tujuan latihan.
3. Tentara Peta ditempatkan langsung di bawah Panglima Tentara, lepas dari badan maupun juga.
4. Tentara Peta merupakan tentara teritorial dengan kewajiban mempertahankan masing-masing daerahnya (*syu*).
5. Tentara Peta di masing-masing daerahnya harus siap untuk melawan sampai mati setiap musuh yang menyerang. (Nugroho Notosusanto, 1979 : 73)

Berdasarkan isi *Osamu Seirei No. 44* kita bisa mengetahui bahwa tentara Peta adalah tentara yang beranggotakan rakyat Indonesia yang dilatih oleh militer Jepang yang berkedudukan di daerah masing-masing dan harus siap mempertahankan daerahnya sampai mati.

Di dalam tubuhnya, tentara Peta memiliki lima tingkat pangkat yang berbeda, yakni :

1. *Daidancho* sama dengan Komandan Batalyon
  2. *Cudancho* sama dengan Komandan Kompi
  3. *Shodancho* sama dengan Komandan Pleton
  4. *Bundancho* sama dengan Komandan Regu
  5. *Giyuhei* sama dengan Prajurit Sukarela
- (Sagimun, 1985 : 41).

Pembentukan tentara Peta di daerah-daerah dalam bentuk batalyon atau disebut *daidan* yang dipimpin oleh seorang komandan batalyon yang disebut *Daidancho*. Dengan kata lain tentara Peta adalah tentara pribumi bentukan Jepang yang dilatih dan dididik di Jawa. Adapun *daidan-daidan* di Jawa terdapat 66 *daidan* dan di Bali 3 *daidan*. Secara komando tentara Peta di setiap *daidan* berada di bawah komando *Gunshireikan* (panglima tertinggi) dan diawasi oleh setiap batalyon Jepang (*daitai*) di dalam satu *Syu* atau lebih.

### 3. Konsep Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia

Pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tanggal 8 Maret 1942 setelah terjadi proses penyerahan kekuasaan oleh Jendral H. Ter Poorten sebagai wakil angkatan perang Sekutu di Indonesia kepada Letnan Jendral Hitoshi Imamura dari angkatan perang Jepang di Kalijati, Jawa Barat. Tujuan pendudukan Jepang terhadap Indonesia adalah untuk mengeruk sumber daya yang ada di Indonesia untuk kebutuhan perang Jepang. Untuk mengontrol dan mengelola daerah pendudukan (Indonesia) agar tujuan pendudukan dapat tercapai maka dibentuk pemerintahan di wilayah Indonesia.

Menurut Ariyono, konsep pemerintahan/*government* adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. (Ariyono S, 1991 : 301)

Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi kegiatan (dinamika), struktural fungsional dan dari segi tugas dan kewenangan (fungsi). Apabila ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Ditinjau dari segi struktural fungsional, pemerintahan berarti seluruh aparat yang melaksanakan fungsi-fungsi negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. Lalu ditinjau dari aspek tugas dan wewenang negara maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara. (Ramlan Surbakti, 1992 : 168)

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk menjalankan dan mengatur suatu kegiatan (sistem) guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pemerintahan yang diterapkan Jepang di Indonesia adalah pemerintahan militer

yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang tentara. Pemerintahan militer dipimpin oleh *Gunseikan* yang berada dibawah komando *Saiko Shikikan* (panglima tertinggi) dan *Gunshireikan* (panglima tertinggi).

Pemerintahan militer Jepang yang dibentuk di Indonesia dibagi tiga, yaitu :

1. Pemerintahan militer Angkatan Darat (Tentara Keduapuluh-lima) untuk Sumatra dengan pusatnya di Bukittinggi.
2. Pemerintahan militer Angkatan Darat (Tentara Keenambelas) untuk Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta.
3. Pemerintahan militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua) untuk daerah yang meliputi Sulawesi, Kalimantan dan Maluku dengan pusatnya di Makassar. (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993 : 5)

Pengambilan kebijakan terhadap daerah pendudukan dilakukan oleh Markas Besar Kerajaan di Tokyo yang dilanjutkan oleh departemen-departemen yang menjadi penghubung terhadap antara pemerintah pusat dengan pemerintahan militer yang terdapat di daerah pendudukan, kendati kebijakan lahir dari pusat akan tetapi pemerintahan militer Jepang di daerah-daerah pendudukanlah yang menerapkan dan mengembangkannya sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Mengenai kebijakan dasar pemerintahan ditentukan oleh Markas Besar Kerajaan di Tokyo. Kemudian dikembangkan oleh beberapa tingkat pengambilan keputusan di bawahnya, yakni Departemen Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Departemen Luar Negeri. Sedangkan rincian dan cara pelaksanaannya kemudian sebagian besar diserahkan kepada masing-masing unit markas tentara di selatan yang berpusat di Saigon. (AJ Sumarmo, 1991 : 22)

Jadi pemerintahan militer pendudukan memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerah pendudukannya.

## B. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang proses perlawanan tentara Peta terhadap pemerintahan militer Jepang di Blitar yang disebabkan oleh faktor ketidakpuasan dan kekecewaan para tentara Peta Blitar terhadap Jepang karena perlakuan dan penindasan yang dilakukan dengan sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia sehingga rakyat hidup dalam penderitaan.

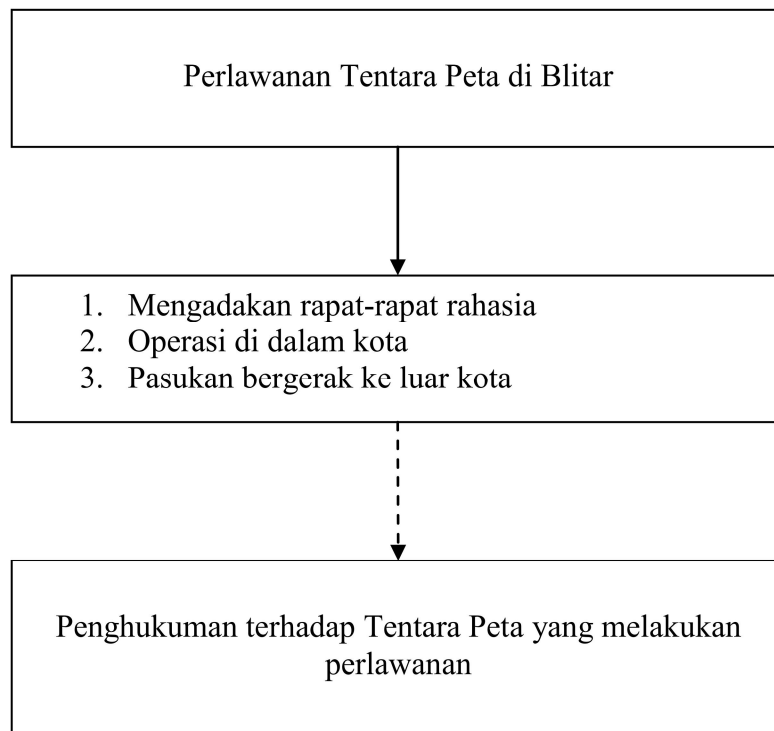
Keadaan ekonomi rakyat Indonesia yang semakin hari semakin memburuk karena para petani dipaksa menjual beras mereka kepada *kumiai* lebih banyak dari kuota yang ditentukan sehingga terkadang untuk makan sendiri pun tidak ada. Kemudian pengerahan para pekerja *romusha* yang dilakukan secara besar-besaran untuk membangun kubu-kubu pertahanan Jepang dan para pekerja *romusha* ini diperlakukan secara tidak manusiawi oleh tentara Jepang dan juga perlakuan yang tidak menyenangkan oleh tentara Jepang terhadap para tentara Peta Blitar yang sangat merendahkan mereka sebagai bangsa Indonesia inilah yang menyebabkan tentara Peta Blitar ingin melakukan perlawanan.

Dalam pelaksanaan perlawanan, sebagai persiapan awal beberapa tentara Peta mulai mengadakan rapat-rapat rahasia untuk menyusun rencana-rencana yang akan dilakukan dan untuk mencari hubungan dengan masyarakat kota Blitar dan *daidan-daidan* lain yang kiranya dapat membantu perlawanan. Rapat-rapat rahasia ini diadakan sebanyak enam kali pertemuan yang dipimpin oleh *Shodancho* Supriyadi dan *Shodancho* Muradi.

Setelah persiapan dirasa sudah cukup, maka pada tanggal 14 Februari 1945 pada pukul tiga dilakukan pembagian senjata kepada pasukan tentara Peta yang disusul dengan komando Supriyadi untuk memulai perlawanan. Para tentara Peta yang telah mengetahui tugasnya masing-masing mulai melakukan operasi di dalam kota dengan menembaki sasaran-sasaran mereka, yaitu rumah para *shidokan*, kantor *kempetai* dan Hotel Sakura milik Jepang. Setelah operasi di dalam kota selesai, kemudian pasukan-pasukan segera bergerak ke luar kota dalam empat koloni, tiga ke arah Gunung Kelud melalui rute barat, utara dan timur sedangkan koloni keempat menuju ke selatan ke arah hutan Lodoyo.

Namun sayangnya, perlawanan tentara Peta ini dapat dilumpuhkan begitu cepat oleh pemerintah Jepang dengan jalan mengadakan perundingan-perundingan dengan para pemimpin rombongan yang tidak pernah ditepati oleh pihak Jepang. Sebagai akibatnya para tentara Peta ini akhirnya ditangkap dan dilucuti senjatanya dan hukuman pun tidak dapat terelakkan lagi. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana proses perlawanan tentara Peta terhadap pemerintahan militer Jepang di Blitar dapat dilihat dalam paradigma di bawah ini.

### C. Paradigma



Ket :

—————▶ : Garis Proses

- - - - -▶ : Garis Akibat



## REFERENSI

- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV*. Balai Pustaka : Jakarta. Halaman 24
- L. M. Sitorus. 1987. *Sejarah Pergerakan dan Kemerdekaan Indonesia*. Dian Jakarta : Jakarta. Halaman 4
- Nugroho Notosusanto. 1979. *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*. PT Gramedia : Jakarta. Halaman 73
- M. D, Sagimun. 1986. *Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Facisme Jepang*. Inty Indayu Press : Jakarta. Halaman 41
- Ariyono S. 1991. *Kamus Antropologi*. Balai Pustaka : Jakarta. Halaman 301
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. PT. Grasindo : Jakarta. Halaman 168
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Balai Pustaka : Jakarta. Halaman 5
- AJ Sumarmo. 1991. *Pendudukan Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*. IKIP Semarang Press. Halaman 22